

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA

(THE IMPLEMENTATION OF POLICY CURRICULUM BASED CULTURE IN SENIOR HIGH SCHOOL 11 YOGYAKARTA)

Oleh: Siti Marfuah, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, sitymarfuah12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 11 Yogyakarta selama bulan April-Juni 2016. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif *Miles and Huberman* yakni dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta dilihat dari aspek: (a) komunikasi dilakukan dengan sosialisasi kepada warga sekolah; (b) sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan, sumber keuangan berasal dari BOS, BOSDA dan Komite Sekolah, kepala sekolah mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan; (c) struktur birokrasi yang baku meliputi; Petunjuk Pelaksana dalam bentuk peraturan daerah dan buku pedoman pelaksanaan kebijakan; (d) pelaksana kebijakan siap bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan; (e) pola implementasi antara lain: terintegrasi pada mata pelajaran, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan 2) Faktor pendukung: dukungan internal berupa antusias, respon dari semua warga dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dukungan eksternal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Komite Sekolah. Faktor penghambat: karakter pelaksana kebijakan berbeda-beda dan belum adanya anggaran khusus dalam melaksanakan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Berbasis Budaya, SMA Negeri 11 Yogyakarta.*

Abstract

The current research aims to describe: (1) the implementation of policy curriculum based culture in Senior High School 11 Yogyakarta, and (2) The supporting factors and the barriers of the education policy implementation. This research is a qualitative study. The research was conducted in Senior High School 11 Yogyakarta from April through June 2016. The research subject of included the principle, teachers and students. The data gathering techniques were interview, observation and study documents. Miles and Huberman interactive model was used as the analysis technique which encompassed data reduction, data presentation, and conclusion. The validity techniques included source and metode triangulation. Based on the research result, several conclusions are drawn. Firstly, the implementation of policy curriculum based culture in Senior High School 11 Yogyakarta seen from aspect: a) Communication done with socialization to the residents school, b) human resources who are in line with the policy, the financial sources derived from BOS , BOSDA and school committee, the school principal has the authority in determine policy, c) standardized bureaucracy structure included: Standard operating system include the regulation and d) commitment of the offices personnel to implement the policies and programs e)implementation type as: integrated in the subject, extracurricular activities, and

habituation; Secondly, the supporting factors: internal supported from enthusiastic; response from all community school and Coordination between implementing. The External supporting from the education department and the department of cultural as well as the school committee. Meanwhile, the barriers ware Implementing character different and the absence of a special budget in implementing policies education curriculum based culture.

Keyword: policy implementation, education based culture, Senior High School 11 of Yogyakarta

PENDAHULUAN

Tantangan kehidupan di era globalisasi ditandai dengan persaingan dunia yang semakin kompetitif, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial yang seringkali menimbulkan ketimpangan-ketimpangan di berbagai belahan dunia, sehingga mengabaikan sisi kemanusiannya. Agar dampak buruk tersebut tidak terjadi maka manusia abad 21 menurut Tilaar (2006: 148-150) adalah manusia Indonesia yang cerdas, yaitu manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Manusia yang cerdas menurut Tilaar diantaranya adalah masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan yang dimiliki meliputi kebudayaan lokal yang merupakan nilai-nilai pertama-tama di kenal di Indonesia. Pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal merupakan salah satu usur dari pendidikan nasional.

Modernisasi dan Globalisasi tidak hanya membawa dampak baik, namun juga

dampak buruk bila sesuatu yang masuk dan kita serap tidak pilih. Salah satu dampak negatifnya yaitu mengakibatkan melemahnya kearifan budaya lokal, sehingga kurang memahami kebudayaan sendiri dan enggan untuk mencintai kebudayaannya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyikapi perubahan tersebut melakukan antisipasi dampak buruk yang lebih besar dari melemahnya nilai-nilai karakter bangsa akibat globalisasi. Salah upaya mencapai visi tersebut adalah melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan berbasis budaya. Pendidikan berbasis budaya dilaksanakan berlandaskan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dilaksanakan di setiap jalur pendidikan baik itu jalur formal, informal dan nonformal yaitu meliputi Kelompok

Bermain, karang taruna, pendidikan keluarga dan sekolah sampai perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraannya terdapat pedoman dan kurikulum pendidikan berbasis budaya sendiri yang kemudian dapat terintegrasi pada kurikulum nasional.

Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman, (2009:134) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Sedangkan George C. Edward III, dalam Subarsono (2008:90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Arif Rohman (2009: 147-149) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan antara lain yaitu: a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan

terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. b) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan; dan c) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasi.

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir 2004: 3) Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang

unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia (Perda DIY No 5 Tahun 2011). Pendidikan berbasis budaya dilaksanakan berlandaskan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap mengapresiasi budaya nasional dan budaya lain di Indonesia serta budaya global yang bersifat positif (Tim Pengembang PBB 2014: 4). Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dilaksanakan di berbagai jalur/jenjang/jenis pendidikan yaitu: pada pendidikan formal meliputi; Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), pada pendidikan nonformal meliputi Paud Nonformal, Kelompok Bermain, dan pada pendidikan informal melalui Pendidikan Keluarga.

SMA Negeri 11 Yogyakarta sebagai salah satu jenjang tingkat satuan pendidikan formal tidak terlepas dari sasaran implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya tersebut. Sekolah melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis budaya yang

terintegrasi kedalam kurikulum nasional yakni saat ini masih KTSP. Pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah belum optimal. Masih terdapat beberapa program yang mendukung kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, misalkan program Jumat berbahasa Jawa, sebagaimana yang disampaikan JS “program Jumat Berbahasa Jawa belum terlaksana sepenuhnya, banyak siswa-siswa sekarang tetap menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan susah untuk unggah-ungguhnya”. Hal serupa juga disampaikan salah satu siswa SIN “campur bahasanya kalau Jawa yang bahasa ngoko, jadi kalau di pelajaran sering tidak mengerti. Selain itu sekolah belum ada laporan hasil pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang dilakukan, sehingga belum tampak sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya ini Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta ?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nana Syaodih S, (2013:60) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan SMA Negeri 11 Yogyakarta, jalan AM Sangaji No. 50, Jetis, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni 2016.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam implementasi kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah yakni, kepala sekolah, Waka kurikulum, guru, dan siswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi 2010:183).

Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, kajian dokumen.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan kisi-kisi pedoman observasi, kisi-kisi kajian dokumen, dan kisi-kisi pedoman wawancara.

Teknik Keabsahan Data

Peneliti ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek atau membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik SMA Negeri 11 Yogyakarta. Sedangkan teknik triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik antara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Kegiatan dalam analisis

data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiono, 2013:234-335).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta

Dalam pandangan George C. Edward III, (dalam Subarsono 2008: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melakukan sosialisasi dengan baik terhadap semua sekolah, termasuk salah satunya SMA Negeri 11 Yogyakarta. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas DIKPORA selain workshop yakni aturan tertulis berupa undang-undang tentang Pengelolaan Pendidikan Berbasis Budaya serta Peraturan Tentang Implementasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya. Setelah sekolah telah mendapat sosialisasi dari Dinas DIKPORA DIY kepala sekolah

selanjutnya menginformasikan kepada guru, staf pendidikan, dan siswa.

Sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah telah tersebar dan dipahami oleh sebagian warga sekolah. Semua warga sekolah telah mengetahui adanya kebijakan tersebut. Selain adanya komunikasi juga adanya koordinasi yang baik dan terjangkau dari semua pihak sekolah. Koordinasi antara kepala sekolah guru serta siswa di SMA Negeri 11 Yogyakarta telah berjalan, sehingga sekolah tidak begitu mengalami kesulitan yang berarti dalam komunikasi mengenai Implementasi kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya.

b. Sumber Daya Sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana serta sumber daya kewenangan.

Kebutuhan sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 11 Yogyakarta telah terpenuhi dan untuk tenaga pendidik telah memiliki keterampilan, serta kompetensi yang dimiliki masing-masing dalam bidang pelajaran yang diampu guru. Sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 11 Yogyakarta meliputi gedung sekolah, ruang kelas dan sarana penunjang

dalam pembelajaran berbasis budaya di antaranya, perlengkapan karawitan, meliputi gamelan dan perlengkapannya, ruang dapur, dan perlengkapan membatik serta media pembelajaran pendidikan berbasis budaya.

Selain itu sumber daya anggaran juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan berbasis budaya karena dalam praktiknya untuk melaksanakan program pendidikan berbasis budaya memerlukan biaya yang cukup besar agar pencapaian sebagaimana yang diharapkan. Untuk anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum pendidikan berbasis budaya sendiri tidak disediakan anggaran khusus oleh pemerintah daerah melainkan terintegrasi dengan anggaran sekolah yakni dari BOS BOSDA dan komite sekolah. Sumber daya anggaran ini diperlukan guna menyediakan sarana penunjang kegiatan berbasis budaya dalam pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka melestarikan budaya.

Kepala Sekolah sebagai manager sekolah memiliki peranan penting dalam kewenangan yang ada dalam implementasi kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah. Kepala sekolah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan keputusan bila ada masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian kurikulum

pendidikan berbasis budaya. Namun dalam kewenangan yang dimiliki kepala sekolah dalam menentukan keputusan juga harus memusyawarahkan terlebih dahulu kepada semua pihak sekolah, agar putusan yang ditentukan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak sekolah.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta sudah ada SOP yang diberikan oleh Dinas DIKPORA yang berfungsi untuk mengurangi atau menghindari kesalahan, kegagalan, dan keraguan para implementator. Sekolah menggunakan buku pedoman tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan program sekolah untuk melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis budaya.

Koordinasi dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta dilakukan dalam bentuk kerja sama antar warga sekolah baik kepala sekolah maupun guru dan siswa sudah cukup baik. Struktur pengorganisasian dalam implementasi kurikulum pendidikan berbasis budaya terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab program, kemudian

Waka kurikulum sebagai penanggung jawab sekolah model pendidikan berbasis budaya dan tim pelaksana kurikulum pendidikan berbasis budaya.

d. Disposisi

Disposisi atau sikap di sini adalah sikap para pelaksana yang mendukung suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Sikap dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya merupakan bagaimana tanggapan, antusiasme dan dukungan yang diperoleh oleh guru, kepala sekolah, serta siswa dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya.

Pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta ini mendapat dukungan yang positif dari semua pihak sekolah, dukungan tersebut berupa kerjasama yang saling mendukung baik Kepala sekolah, staf kependidikan antar guru, serta seluruh siswa SMA Negeri 11 Yogyakarta dalam berbagai kegiatan kebudayaan baik dilakukan dalam proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan lain di luar pelajaran. Semua pihak sekolah juga merespon dengan positif terhadap pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah baik integrasi dalam pelajaran maupun kegiatan

pengembangan diri lain dalam bentuk ekstrakurikuler maupun melalui pembiasaan. Guru maupun siswa tidak keberatan dengan adanya kurikulum pendidikan berbasis budaya, mereka bahkan mengapresiasi dengan adanya kurikulum pendidikan berbasis budaya ini dapat memperkuat nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Antusias warga sekolah dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta juga cukup tinggi. Terlihat dari antusias siswa saat mengikuti proses belajar mengajar dan banyaknya prestasi sekolah maupun siswa dalam lomba-lomba terkait budaya. Di samping itu juga adanya antusias dari guru untuk selalu belajar dan mengembangkan keterampilannya seperti melakukan diskusi dengan guru lain dan mengikuti berbagai workshop pendidikan berbasis budaya. Guru mampu memahami apa yang dijelaskan kepala sekolah dengan baik sehingga guru dapat menyampaikan materi pelajaran yang terintegrasi pendidikan berbasis budaya yang dikembangkan sebagai keunggulan lokal daerah.

e. Pola Implementasi

Pola implementasi yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan berbasis budaya yang

dilakukan yakni: (1) terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang meliputi, seni budaya, penjaskes, tata boga dan bahasa daerah (Bahasa Jawa), (2) melalui pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler. Peserta didik diberikan kesempatan mengekspresikan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan budaya sekolah, budaya yang dikembangkan sekolah yang tanamkan antara lain: a) sikap sopan santun, menjunjung tinggi kejujuran dan tanggungjawab, berjiwa nasionalis dan menjadikan peserta didik yang religius dan toleransi; b) artefak meliputi slogan-slogan atau hiasan yang bernuansa budaya, seni pertunjukan seperti tari gaya Yogyakarta, peralatan musik tradisional dan menggunakan pakaian adat setiap Kamis *Pahing*; c) adat istiadat meliputi gotong royong, musyawarah/diskusi.

a. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yaitu; (1) dukungan internal berupa antusias, respon dan dukungan sosial yang baik dari warga sekolah dan komunikasi antar pelaksana kebijakan, (2) dukungan eksternal berupa adanya dukungan lembaga terkait baik dari dinas pendidikan maupun dinas kebudayaan serta komite sekolah.

Faktor Penghambat antara lain, karakter pelaksana kebijakan di sekolah yang berbeda-beda dan belum adanya anggaran khusus dalam melaksanakan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Kebijakan kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta dilihat dari aspek; a) komunikasi dilakukan dengan sosialisasi kepada warga sekolah, b) sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan, sumber keuangan berasal dari BOS, BOSDA dan komite sekolah, kepala sekolah mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan, c) struktur birokrasi yang baku, d) pelaksana kebijakan siap bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dan e) Pola implementasi kurikulum pendidikan berbasis budaya yang dilakukan di SMA N 11 Yogyakarta adalah melalui 3 cara antara lain: (1) terintegrasi pada mata pelajaran; (2) pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler; dan 3) pengembangan budaya satuan pendidikan berbasis budaya khas Yogyakarta dalam kegiatan sehari-hari. Faktor pendukung: dukungan internal berupa antusias, dan respon dari semua

warga dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dukungan eksternal dari dinas pendidikan maupun dinas kebudayaan serta komite sekolah. Faktor penghambat: karakter pelaksana kebijakan di sekolah yang berbeda-beda dan belum adanya anggaran khusus dalam melaksanakan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya.

Saran

1. Adanya monitoring dan evaluasi sekolah oleh Dinas pendidikan.
2. Perlu adanya alokasi anggaran khusus dari pemerintah dalam mendukung kurikulum pendidikan berbasis budaya.
3. Adanya koordinasi antar sekolah dalam pengembangan implementasi kurikulum pendidikan berbasis budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Dakir. (2004). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- H.A.R Tilaar. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Daerah Istimawa Yogyakarta Tentang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Diunduh melalui www.idih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_DIY_5_2011.pdf pada 14 Februari 2016.

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto.(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.